

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jadis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, edisi revisi, cet sembilan, (Depok: raja Grafindo, 2004).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.19.
- Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri, 2012).
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).
- Hasanuddin Rahman, *Aspek - Aspek Hukum Perikatan Kredit Perbankan*, (Bandung; PT. Citra Aditya bakti, 1996).
- H. Salim. HS, *Hukum Jaminan di Indonesia*, ed-1, cet-7, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014).
- H. Budi Untung, *Analisis kredit perbankan, Tinjauan secara Legal*, (Yogyakarta; Andi Ofset, 2011).
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, ed. 2 , (Yogyakarta: Andi, 2011).

- I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018).
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memaham Bisnis Bank, ed.2*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Johannes Ibrahim, dan Yohannes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, cetakan kedua*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009).
- Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Legal Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, ed.2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010).
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- R. Subekti, *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991).
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, *Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria*

Indonesia, *Undang – Undang Nomor Hak Tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, UU No. 4 Tahun 1996, LNRI No. 42 Tahun 1996, TLNRI No. 3632.*

Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].* Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

Indonesia., *Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).*

Indonesia, *Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Indonesia, *Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notari.*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*

*Undang -undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,*

Indonesia, *Surat edaran Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4/SE/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.*

Indonesia, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang,

Indonesia, Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 2 ayat 1.

### C. Artikel

Selfie Miftahul Jannah, DetikFinance.com, Berapa Juta Bidang Tanah belum Bersertifikat? Ini kata Menteri ATR, 19 Januari 2018, 17:25 WIB

Arso, KanalIndonesia.com, PTSL beda dengan PRONA, ini perbedaannya..., 30 Januari 2018, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, 11:58 WIB.

Albert Aries, S.H., M.H, Hukum Online, Kekuatan Pembuktian Fotocopi Dokumen, 27 Juni 2013, diakses pada tanggal 11 September 2018, 17:43 WIB.

Kepastian hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada tanggal 24-12-2018, 9.20 WIB.

